

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



# INSPEKTORAT JENDERAL

## IKU & IKK

2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
&  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : ITJ-43.OT.02.01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
NOMOR: ITJ-10.OT.02.01 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PENGAWASAN  
DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA SERTA FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET  
TAHUN 2020- 2024**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sampai dengan 2024, perlu dilakukan pengawasan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Formulasi Perhitungan Capaian Target Tahun 2020- 2024;

- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024 serta Rumusan Formulasi Perhitungan Capaian Target, penyesuaian dengan dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, RKA-KL TA.2021, Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, perlu mengubah Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Formulasi Perhitungan Capaian Target Tahun 2020- 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Formulasi Perhitungan Capaian Target Tahun 2020- 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR: ITJ-10.OT.02.01 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2020- 2024.
- KESATU** : Mengubah Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawas dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Formulasi Perhitungan Capaian Target Tahun 2020- 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Rumusan Formulasi Perhitungan Capaian Target sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan pengawasan tahun 2020-2024, penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang ditetapkan sertasebagai dasar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- KETIGA** : Setiap pengukuran target diluar rumusan perhitungan capaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam keputusan ini wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektur Jenderal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2020



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal

Lampiran I Keputusan Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : ITJ-43.OT.02.01 TAHUN 2020  
Tanggal : 15 Desember 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
INSPEKTORAT JENDERAL SERTA RUMUSAN FORMULASI PERHITUNGAN  
CAPAIAN TARGET TAHUN 2020 – 2024**

- Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Program :
  - 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM (2020)
  - 2. Program Dukungan Manajemen (2021-2024)



Inspektur Jenderal,

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Lampiran II Keputusan Inspektur Jenderal  
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Nomor : ITJ-43.OT.02.01 TAHUN 2020  
 Tanggal : 15 Desember 2020

**CASECADING INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

**PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

| <b>Cascading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Strategis / Sasaran Program</b>                                                                                                                            | <b>Indikator Kinerja Utama</b> | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                          | <b>Target 2020</b>    | <b>Penanggung Jawab</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                     | 3                              | 4                                                                     | 5                     | 6                       |
| SS-8<br>Kemenkumham                | <b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b>                                                            | Opini Atas Laporan Keuangan    | Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP                   | Inspektur Jenderal      |
| SP-1                               | Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel                                                                                             |                                |                                                                       |                       |                         |
| SS-8<br>Kemenkumham                | <b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b>                                                            |                                |                                                                       |                       |                         |
| SP-2                               | Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | Nilai Maturitas SPIP           | Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP                                | Level 3 - Terdefinisi |                         |

|                             |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                    |     |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|
| SP-3                        | Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM | Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB”               | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham                           | 90% |  |
|                             |                                                                                                                     | Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90           | Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Kemenkumham                           | 90% |  |
|                             |                                                                                                                     | Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | Hasil Evaluasi Satker WBK/WBBM dari KemenpanRB                     | 5%  |  |
| <b>SS-8<br/>Kemenkumham</b> | <b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b>          | Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM               | Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN | 65  |  |
| SP-3                        | Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM |                                                                    |                                                                    |     |  |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                                                  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                                                                                       | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                | <b>Target 2021</b>  | <b>Penanggung Jawab</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                           | 5                   | 9                       |
| SK-1                                | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                                         | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                  | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah I     |
| SK-2                                | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I                             | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL I               | 50%                 |                         |
|                                     |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL I                           | Jumlah TL ITWIL I kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%  | 90%                 |                         |
|                                     |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL I                            | Jumlah TL ITWIL I kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%   | 90%                 |                         |
|                                     |                                                                                                                                          | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL I | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL I    | 85%                 |                         |
|                                     |                                                                                                                                          | Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL I                                      | Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL I | 5 Satker            |                         |

|      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SK-3 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                                                                                                                                                                           | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                                                                                                                                               | Level 3 Terdefinisi   | Inspektur Wilayah II |
| SK-4 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM                                 | <p>Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II</p> <p>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL II</p> | <p>Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL II</p> <p>Jumlah TL ITWIL II kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%</p> | <p>50%</p> <p>90%</p> |                      |
|      | Percentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL II                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah TL ITWIL II kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%                                                                                                                               | 90%                   |                      |
|      | Percentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Percentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL II                                                                                                                                | 85%                   |                      |
|      | Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL II                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL II                                                                                                                             | 5 Satker              |                      |
|      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                      |

|      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                     |                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| SK-5 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                                           | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                    | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah III |
| SK-6 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III                             | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL III               | 50%                 |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL III                           | Jumlah TL ITWIL III kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%  | 90%                 |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL III                            | Jumlah TL ITWIL III kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%   | 90%                 |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL III | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL III    | 85%                 |                       |
|      |                                                                                                                                          | Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL III                                      | Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL III | 5 Satker            |                       |

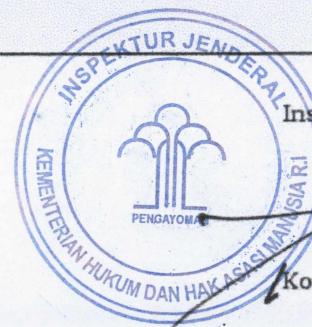
|      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                     |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| SK-7 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                                          | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                   | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah IV |
| SK-8 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV                             | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL IV               | 50%                 |                      |
|      |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL IV                           | Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%  | 90%                 |                      |
|      |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL IV                            | Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%   | 90%                 |                      |
|      |                                                                                                                                          | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL IV | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL IV    | 85%                 |                      |
|      |                                                                                                                                          | Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL IV                                      | Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL IV | 5 Satker            |                      |

|       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| SK-9  | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                                                                                                                                             | Level 3 Terdefinisi   | Inspektur Wilayah V |
| SK-10 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | <p>Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V</p> <p>Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL V</p> | <p>Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL V</p> <p>Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%</p> | <p>50%</p> <p>90%</p> |                     |
|       |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL V                                                                                                                                                            | Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%                                                                                                                              | 90%                   |                     |
|       |                                                                                                                                          | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL V                                                                                                                                 | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL V                                                                                                                               | 85%                   |                     |
|       |                                                                                                                                          | Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL V                                                                                                                                                                      | Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL V                                                                                                                            | 5 Satker              |                     |

|       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                     |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| SK-11 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                                          | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                   | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah VI |
| SK-12 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI                             | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL VI               | 50%                 |                      |
|       |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL VI                           | Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pengawasan ITJEN DIBAGI 4 surat TL dikali 100%  | 90%                 |                      |
|       |                                                                                                                                          | Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL VI                            | Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK DIBAGI 4 surat TL dikali 100%   | 90%                 |                      |
|       |                                                                                                                                          | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL VI | Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, DIBAGI total penugasan DIKALI 100%, dilingkungan ITWIL VI    | 85%                 |                      |
|       |                                                                                                                                          | Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL VI                                      | Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL VI | 5 Satker            |                      |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA SUBBAG TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                        | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                                                     | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                         | <b>Target 2020</b> | <b>Penanggung Jawab</b>                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                    | 5                  | 6                                                                         |
| SK-1                                | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> | Persentase pengelolaan ketatausahaan yang terfasilitasi secara tepat waktu di lingkungan Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI | Jumlah pengelolaan tata usaha yang difasilitasi tepat waktu di bagi dengan target dikali 100%<br>(dihitung dari jumlah laporan berkala yang disusun) | 95%                | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI |



Inspektor Jenderal,

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**CASECADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT ITJEN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                        | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                              | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                                        | <b>Target 2020</b>    | <b>Penanggung Jawab</b>                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                              | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                   | 5                     | 6                                                                     |
| SK-13                               | Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar                     | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun   | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun                                                        | 1 Rekomendasi         | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Sistem Informasi Pengawasan)  |
| SK-14                               | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Indeks RB ITJEN                                                                                                | Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP                                                                                                                                | 91                    | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Program, Humas dan Pelaporan) |
|                                     |                                                                                                                | Nilai SAKIP ITJEN "Baik"                                                                                       | Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP                                                                                                                                | 85                    |                                                                       |
|                                     |                                                                                                                | Nilai Maturitas SPIP ITJEN                                                                                     | Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP                                                                                                                       | Level 3 (Terdefinisi) |                                                                       |
|                                     |                                                                                                                | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara | Jumlah Rekomendasi APIP terkait Pengembalian ke kas Negara yang ditindaklanjuti DIBAGI Total Jumlah Rekomendasi APIP terkait Pengembalian ke kas Negara DIKALI 100% | 60%                   |                                                                       |
|                                     |                                                                                                                | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi    | Jumlah Rekomendasi APIP terkait administrasi yang ditindaklanjuti DIBAGI Total Jumlah Rekomendasi APIP terkait administrasi DIKALI 100%                             | 80%                   |                                                                       |

|       |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |     |                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                        | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara            | Jumlah Rekomendasi BPK terkait Pengembalian ke kas Negara yang ditindaklanjuti DIBAGI Total Jumlah Rekomendasi BPK terkait Pengembalian ke kas Negara DIKALI 100% | 20% |                                                                                  |
|       |                                                                                                        | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi               | Jumlah Rekomendasi BPK terkait administrasi yang ditindaklanjuti DIBAGI Total Jumlah Rekomendasi BPK terkait administrasi DIKALI 100%                             | 75% |                                                                                  |
| SK-15 | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi                                                                             | Jumlah SDM ITJEN yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total pegawai ITJEN dikali 100%                                                                          | 80% | Sekretaris<br>Inspektorat Jenderal<br>(Bagian Kepegawaian)                       |
|       |                                                                                                        | Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai                                                                         | Hasil Survey Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                                                                                              | 3   |                                                                                  |
| SK-16 | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif    | Presentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal | Jumlah layanan teknologi informasi yang terfasilitasi dibagi dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi (kebutuhan pengguna/ user)                       | 80% | Sekretaris<br>Inspektorat Jenderal<br>(Bagian Sistem<br>Informasi<br>Pengawasan) |
| SK-17 | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                              | Presentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel                                                                     | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (001) dibagi total anggaran (001 )dikali 100%                                                                       | 85% | Sekretaris<br>Inspektorat Jenderal<br>(Bagian Keuangan)                          |
|       |                                                                                                        |                                                                                                                             | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (002) dibagi total anggaran (002 )dikali 100%                                                                       | 85% |                                                                                  |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel                      | Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel                                                                                       | Hasil laporan keuangan KEMENKUMHAM                                                                                                                                | WTP | Sekretaris<br>Inspektorat Jenderal<br>(Kepala Bagian<br>Keuangan)                |
|       |                                                                                                        | Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal                                                            | Persentase realisasi keuangan ITJEN                                                                                                                               | 85% |                                                                                  |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN PROGRAM, HUMAS DAN PELAPORAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                        | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> | <b>Formulasi Perhitungan</b>                  | <b>Target 2020</b>    | <b>Penanggung Jawab</b>                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                              | 3                                 | 4                                             | 5                     | 6                                                     |
| SK-14                               | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Indeks RB ITJEN                   | Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP          | 91                    | Kepala Bagian Program, Humas dan Pelaporan            |
|                                     |                                                                                                                | Nilai SAKIP ITJEN "Baik"          | Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP          | 85                    |                                                       |
|                                     |                                                                                                                | Nilai Maturitas SPIP ITJEN        | Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP | Level 3 (Terdefinisi) |                                                       |
| SK-14                               | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Indeks RB ITJEN                   | Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP          | 91                    | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi |
| SK-14                               | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Nilai SAKIP ITJEN "Baik"          | Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP          | 85                    | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan              |
|                                     |                                                                                                                | Nilai Maturitas SPIP ITJEN        | Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP | Level 3 (Terdefinisi) |                                                       |

|       |                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                        |     |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| SK-14 | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Presentase fasilitasi publikasi kegiatan pengawasan untuk citra positif ITJEN      | Jumlah publikasi yang difasilitasi DIBAGI Jumlah publikasi yang ditargetkan (80 publikasi) DIKALI 100% | 90% | Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat              |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel                              | Presentase fasilitasi pengelolaan Tindaklanjut Rekomendasi Penyusunan RKA-KL ITJEN | Rekomendasi CHR Anggaran yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi CHR Anggaran dikali 100%       | 90% | Kepala Sub Bagian Penyusunan, Rencana dan Anggaran |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                        | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                             | <b>Target 2020</b> | <b>Penanggung Jawab</b>                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                      | 3                                                                                        | 4                                                                                        | 5                  | 6                                                       |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi                                          | Jumlah SDM ITJEN yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total pegawai ITJEN dikali 100% | 80%                | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|                                     |                                                                                                        | Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                          | Hasil Survey Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                     | 3                  |                                                         |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Persentase pegawai yang memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi                    | Jumlah pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi dibagi total pegawai dikali 100%  | 80%                | Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan dan Pengembangan |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Persentase pegawai yang dilakukan assessment (diklat/mutasi/promosi/rolling/dan lainnya) | Jumlah pegawai yang dilakukan assessment dibagi total pegawai dikali 100%                | 60%                | Kasubbag Mutasi dan Pemberhentian                       |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                          | Hasil survei internalisasi tata nilai                                                    | 3                  | Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian                      |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN UMUM  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                        | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                          | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                              | <b>Target 2020</b> | <b>Penanggung Jawab</b>                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                              | 3                                                          | 4                                                                                         | 5                  | 6                                                  |
| SK-17                               | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                                      | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel    | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (002) dibagi total anggaran 002 dikali 100% | 85%                | Kepala Bagian Umum                                 |
| SK-17                               | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                                      | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel    | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (002) dibagi total anggaran 002 dikali 100% | 85%                | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Pengelolaan BMN |
| SK-17                               | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                                      | Persentase surat yang terfasilitasi tepat waktu            | Jumlah surat yang terfasilitasi tepat waktu dibagi total surat dikali 100%                | 85%                | Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip             |
| SK - 14                             | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Persentase pengelolaan layanan pimpinan yang terfasilitasi | Persentase pengelolaan layanan pimpinan yang terfasilitasi                                | 100%               | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Cascading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                             | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                                           | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                | <b>Target 2020</b> | <b>Penanggung Jawab</b>                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                           | 5                  | 6                                                 |
| SK-13                              | Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar          | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun                | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun                                | 1 Rekomendasi      | Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan         |
| SK-16                              | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif | Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal | Jumlah layanan teknologi informasi yang terfasilitasi dibagi dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi (kebutuhan pengguna/ user) | 82%                |                                                   |
| SK-16                              | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif | Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal | Jumlah layanan teknologi informasi yang terfasilitasi dibagi dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi (kebutuhan pengguna/ user) | 82%                | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Teknologi Informasi |

|       |                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                  |               |                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| SK-16 | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif            | Presentasi pengelolaan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan internal                       | Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang dibuat analisis per jenis temuan                                         | 82%           | Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan I  |
| SK-16 | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif            | Presentasi pengelolaan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal                     | Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dibuat analisis per jenis temuan                                    | 82%           | Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan II |
| SK-13 | Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar                     | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM, yang disusun    | 1 Rekomendasi |                                                                     |
| SK-14 | Mengoptimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Presentase pengelolaan pengaduan yang difasilitasi                                              | Presentase pengelolaan pengaduan yang difasilitasi tepat waktu dibagi dengan total layanan pengaduan dikali 100% | 90%           | Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan                                 |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                           | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                              | <b>Target 2020</b> | <b>Penanggung Jawab</b>                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                                | 4                                                                                         | 5                  | 6                                      |
| SK - 17                             | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                         | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel          | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (001) dibagi total anggaran 001 dikali 100% | 85%                | Kepala Bagian Keuangan                 |
| SK-18                               | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel                            | Hasil laporan keuangan KEMENKUMHAM                                                        | WTP                |                                        |
|                                     |                                                                                   | Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal | Persentase realisasi keuangan ITJEN                                                       | 85%                |                                        |
| SK - 17                             | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                         | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel          | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (001) dibagi total anggaran 001 dikali 100% | 85%                | Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran |
| SK-18                               | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal | Persentase realisasi keuangan ITJEN                                                       | 85%                |                                        |

|       |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                          |      |      |      |      |                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Persentase pengajuan anggaran perjalanan dinas yang difasilitasi tepat waktu | Jumlah pengajuan anggaran perjalanan dinas yang difasilitasi tepat waktu dibagi dengan total usulan pengajuan perkalan dinas dikali 100% | 90%  | 92%  | 93%  | 95%  | Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas               |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel                                        | Persentase temuan laporan keuangan ITJEN yang ditindaklanjuti untuk mendukung WTP                                                        | 100% | 100% | 100% | 100% | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Persentase ketersediaan anggaran perbulan melalui UP, TUP, SPM, GUP          | Jumlah ketersediaan anggaran perbulan melalui UP, TUP, SPM, GUP dibagi anggaran yang diajukan ITWIL/Bagian dikali 100%                   | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan                 |



Inspektur Jenderal,

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Lampiran III Keputusan Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : ITJ-43.OT.02.01 TAHUN 2020  
Tanggal : 15 Desember 2020

**CASECADING INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

| <i>Cascading Sasaran Strategis</i> | <i>Sasaran Strategis / Sasaran Program</i>                                                                                                                               | <i>Indikator Kinerja Utama</i>                                     | <i>Formulasi Perhitungan</i>                                          | <i>Target</i>         |                       |                       |                                 | <i>Penanggung Jawab</i> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                       | <b>2021</b>           | <b>2022</b>           | <b>2023</b>           | <b>2024</b>                     |                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                  | 4                                                                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                               | 9                       |
| SS-8 Kemenkumham                   | <b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b>                                                               | Opini Atas Laporan Keuangan                                        | Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP                   | WTP                   | WTP                   | WTP                             | Inspektur Jenderal      |
| SP-1                               | Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel                                                                                                |                                                                    |                                                                       |                       |                       |                       |                                 |                         |
| SS-8 Kemenkumham                   | <b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b>                                                               | Nilai Maturitas SPIP                                               | Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP                                | Level 3 - Terdefinisi | Level 3 - Terdefinisi | Level 3 - Terdefinisi | Level 4 - Terkelola dan terukur |                         |
| SP-2                               | Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM    |                                                                    |                                                                       |                       |                       |                       |                                 |                         |
| SP-3                               | Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi |                                                                    |                                                                       |                       |                       |                       |                                 |                         |
|                                    |                                                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"               | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham                              | 92%                   | 93%                   | 94%                   | 95%                             |                         |
|                                    |                                                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90           | Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Kemenkumham                              | 92%                   | 93%                   | 94%                   | 95%                             |                         |
|                                    |                                                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | Hasil Evaluasi Satker WBK/WBBM dari KemenpanRB                        | 6%                    | 6%                    | 6%                    | 6%                              |                         |



**CASECADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| <b>Cascading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                                                  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                                                                          | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                                                             | <b>Target</b>       |                     |                     |                     | <b>Penanggung Jawab</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         |                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                       |
| SK-1                               | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                            | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                                                                               | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah I     |
| SK-2                               | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I                | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL I                                                                            | 52%                 | 56%                 | 60%                 | 62%                 |                         |
|                                    |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 62%                 | 65%                 | 68%                 | 70%                 |                         |
|                                    |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I      | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                     | 82%                 | 86%                 | 88%                 | 90%                 |                         |
|                                    |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 22%                 | 25%                 | 28%                 | 30%                 |                         |
|                                    |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I    | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                    | 78%                 | 80%                 | 82%                 | 84%                 |                         |
|                                    |                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM                                                                           | Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL I                                              | 6%                  | 6%                  | 6,5%                | 6,5%                |                         |

| SK-3 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                               | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN                                                                                                                         | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                                                                               | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah II |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| SK-4 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II                | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL II                                                                           | 52%                 | 56%                 | 60%                 | 62%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 62%                 | 65%                 | 68%                 | 70%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II      | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                     | 82%                 | 86%                 | 88%                 | 90%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 22%                 | 25%                 | 28%                 | 30%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II    | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                    | 78%                 | 80%                 | 82%                 | 84%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM                                                                           | Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL II                                             | 6%                  | 6%                  | 6,5%                | 6,5%                |                      |  |

|      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                            |                     |                     |                     |                     |                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| SK-5 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kemenkumham                                                                                                                                     | Kapabilitas APIP ITJEN                                                                                                                                                                   | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Inspektor Wilayah III |
| SK-6 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III                | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL III                                                                          | 52%                                        | 56%                 | 60%                 | 62%                 |                     |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 62%                                        | 65%                 | 68%                 | 70%                 |                     |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III      | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                     | 82%                                        | 86%                 | 88%                 | 90%                 |                     |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 22%                                        | 25%                 | 28%                 | 30%                 |                     |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III    | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                    | 78%                                        | 80%                 | 82%                 | 84%                 |                     |                       |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM                                                                           | Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL III                                            | 6%                                         | 6%                  | 6,5%                | 6,5%                |                     |                       |

| SK-7 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                                           | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham                                                                                                             | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                                                                               | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah IV |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| SK-8 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV                | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL IV                                                                           | 52%                 | 56%                 | 60%                 | 62%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 62%                 | 65%                 | 68%                 | 70%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV      | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                     | 82%                 | 86%                 | 88%                 | 90%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 22%                 | 25%                 | 28%                 | 30%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV    | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                    | 78%                 | 80%                 | 82%                 | 84%                 |                      |  |
|      |                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM                                                                           | Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL IV                                             | 6%                  | 6%                  | 6,5%                | 6,5%                |                      |  |

| SK-9  | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                               | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN                                                                                                                        | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                                                                               | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah V |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| SK-10 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V                | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL V                                                                            | 52%                 | 56%                 | 60%                 | 62%                 |                     |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 62%                 | 65%                 | 68%                 | 70%                 |                     |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V      | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                     | 82%                 | 86%                 | 88%                 | 90%                 |                     |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 22%                 | 25%                 | 28%                 | 30%                 |                     |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V    | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                    | 78%                 | 80%                 | 82%                 | 84%                 |                     |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM                                                                           | Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL V                                              | 6%                  | 6%                  | 6,5%                | 6,5%                |                     |  |

| SK-11 | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>                               | Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN                                                                                                                         | Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP                                                                                                                                               | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Level 3 Terdefinisi | Inspektur Wilayah VI |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| SK-12 | Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI                | Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL VI                                                                           | 52%                 | 56%                 | 60%                 | 62%                 |                      |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 62%                 | 65%                 | 68%                 | 70%                 |                      |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI      | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                     | 82%                 | 86%                 | 88%                 | 90%                 |                      |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas negara yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal yang wajib dikembalikan ke kas negara dikali 100% | 22%                 | 25%                 | 28%                 | 30%                 |                      |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI    | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal dikali 100%                                                    | 78%                 | 80%                 | 82%                 | 84%                 |                      |  |
|       |                                                                                                                                          | Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM                                                                           | Jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di lingkungan ITWIL VI                                             | 6%                  | 6%                  | 6,5%                | 6,5%                |                      |  |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA SUBBAG TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| Cascading Sasaran Strategis | Sasaran Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                            | Formulasi Perhitungan                                                                                                                             | Target |      |      |      | Penanggung Jawab                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                           |
| SK-1                        | Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> | Persentase pengelolaan ketatausahaan yang terfasilitasi secara tepat waktu di lingkungan Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI | Jumlah pengelolaan tata usaha yang difasilitasi tepat waktu di bagi dengan target dikali 100% (dihitung dari jumlah laporan berkala yang disusun) | 95%    | 95%  | 95%  | 95%  | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI |
|                             |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |        |      |      |      |                                                                           |



Inspektor Jenderal,  
Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**CASECADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT ITJEN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| <b>Casedading<br/>Sasaran<br/>Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                        | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                                           | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                | <b>Target</b>                                                                          |                       |                       |                       | <b>Penanggung Jawab</b>                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                             | <b>2021</b>                                                                            | <b>2022</b>           | <b>2023</b>           | <b>2024</b>           |                                                                       |
| 1                                           | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                      | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                                                     |
| SK-13                                       | Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar                     | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun                | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun                                | 1 Rekomendasi                                                                          | 1 Rekomendasi         | 1 Rekomendasi         | 1 Rekomendasi         | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Sistem Informasi Pengawasan)  |
| SK-14                                       | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Indeks RB ITJEN                                                                                                             | Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP                                                                                                        | 14,17                                                                                  | 14,18                 | 14,19                 | 14,2                  | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Program, Humas dan Pelaporan) |
|                                             |                                                                                                                | Nilai SAKIP ITJEN "Baik"                                                                                                    | Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP                                                                                                        | 82,88                                                                                  | 82,89                 | 82,9                  | 82,91                 |                                                                       |
|                                             |                                                                                                                | Nilai Maturitas SPIP ITJEN                                                                                                  | Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP                                                                                               | Level 3 (Terdefinisi)                                                                  | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) |                                                                       |
| SK-15                                       | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional         | Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi                                                                             | Jumlah SDM ITJEN yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total pegawai ITJEN dikali 100%                                                    | 82%                                                                                    | 85%                   | 87%                   | 88%                   | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Kepegawaian)                  |
|                                             |                                                                                                                | Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                                                             | Hasil Survey Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                                                                        | 3                                                                                      | 4                     | 4                     | 5                     |                                                                       |
| SK-16                                       | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif            | Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal | Jumlah layanan teknologi informasi yang terfasilitasi dibagi dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi (kebutuhan pengguna/ user) | 82%                                                                                    | 85%                   | 87%                   | 90%                   | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Sistem Informasi Pengawasan)  |
| SK-17                                       | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                                      | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel                                                                     | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (002) dibagi total anggaran (002) dikali 100%                                                 | 85%                                                                                    | 86%                   | 87%                   | 90%                   | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Umum)                         |
|                                             |                                                                                                                |                                                                                                                             | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (001) dibagi total anggaran (001 )dikali 100%                                                 | 85%                                                                                    | 86%                   | 87%                   | 90%                   | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Keuangan)                     |
|                                             |                                                                                                                |                                                                                                                             | Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal                                                                        | Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal yang difasilitasi | 12 bulan              | 12 bulan              | 12 bulan              | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Umum)                         |

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |     |     |     |     |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel                                              | Hasil laporan keuangan KEMENKUMHAM                                                               | WTP | WTP | WTP | WTP | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Kepala Bagian Keuangan)              |
|       |                                                                                   | Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal                   | Persentase realisasi keuangan ITJEN                                                              | 90% | 92% | 93% | 95% |                                                                       |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Persentase fasilitasi pengelolaan Tindaklanjut Rekomendasi Penyusunan RKA-KL ITJEN | Rekomendasi CHR Anggaran yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi CHR Anggaran dikali 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | Sekretaris Inspektorat Jenderal (Bagian Program, Humas dan Pelaporan) |
|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |     |     |     |     |                                                                       |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN PROGRAM, HUMAS DAN PELAPORAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                        | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                  | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                     | <b>Target</b>         |                       |                       |                       | <b>Penanggung Jawab</b>                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                  | <b>2021</b>           | <b>2022</b>           | <b>2023</b>           | <b>2024</b>           |                                                       |
| 1                                   | 2                                                                                                              | 3                                                                                  | 4                                                                                                | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                                     |
| SK-14                               | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Indeks RB ITJEN                                                                    | Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP                                                             | 14,17                 | 14,18                 | 14,19                 | 14,2                  | Kepala Bagian Program, Humas dan Pelaporan            |
|                                     |                                                                                                                | Nilai SAKIP ITJEN "Baik"                                                           | Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP                                                             | 82,88                 | 82,89                 | 82,9                  | 82,91                 |                                                       |
|                                     |                                                                                                                | Nilai Maturitas SPIP ITJEN                                                         | Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP                                                    | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) |                                                       |
| SK-18                               | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel                              | Presentase fasilitasi pengelolaan Tindaklanjut Rekomendasi Penyusunan RKA-KL ITJEN | Rekomendasi CHR Anggaran yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi CHR Anggaran dikali 100% | 95%                   | 95%                   | 95%                   | 95%                   |                                                       |
| SK-14                               | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Indeks RB ITJEN                                                                    | Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP                                                             | 14,17                 | 14,18                 | 14,19                 | 14,2                  | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi |
| SK-14                               | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Nilai SAKIP ITJEN "Baik"                                                           | Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP                                                             | 82,88                 | 82,89                 | 82,9                  | 82,91                 | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan              |
|                                     |                                                                                                                | Nilai Maturitas SPIP ITJEN                                                         | Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP                                                    | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) | Level 3 (Terdefinisi) |                                                       |

|       |                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                        |     |     |     |     |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
| SK-14 | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Presentase fasilitasi publikasi kegiatan pengawasan untuk citra positif ITJEN      | Jumlah publikasi yang difasilitasi DIBAGI Jumlah publikasi yang ditargetkan (80 publikasi) DIKALI 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat              |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel                              | Presentase fasilitasi pengelolaan Tindaklanjut Rekomendasi Penyusunan RKA-KL ITJEN | Rekomendasi CHR Anggaran yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi CHR Anggaran dikali 100%       | 95% | 95% | 95% | 95% | Kepala Sub Bagian Penyusunan, Rencana dan Anggaran |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                               | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                             | <b>Target</b> |             |             |             | <b>Penanggung Jawab</b>                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                          | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |                                                         |
| 1                                   | 2                                                                                                      | 3                                                                                               | 4                                                                                        | 5             | 6           | 7           | 8           | 9                                                       |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi                                                 | Jumlah SDM ITJEN yang memenuhi standar kompetensi dibagi Total pegawai ITJEN dikali 100% | 82%           | 85%         | 87%         | 88%         | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|                                     |                                                                                                        | Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                                 | Hasil Survey Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                     | 3             | 4           | 4           | 5           |                                                         |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Persentase pegawai yang memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi                           | Jumlah pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi dibagi total pegawai dikali 100%  | 82%           | 85%         | 87%         | 88%         | Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan dan Pengembangan |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Persentase pegawai yang dilakukan <i>assessment</i> (diklat/mutasi/promosi/rolling/dan lainnya) | Jumlah pegawai yang dilakukan <i>assessment</i> dibagi total pegawai dikali 100%         | 60%           | 60%         | 60%         | 60%         | Kasubbag Mutasi dan Pemberhentian                       |
| SK-15                               | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham                                 | Hasil survei internalisasi tata nilai                                                    | 3             | 4           | 4           | 5           | Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian                      |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN UMUM  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| <b>Cascading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                        | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                      | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                              | <b>Target</b> |             |             |             | <b>Penanggung Jawab</b>                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                           | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |                                                    |
| 1                                  | 2                                                                                                              | 3                                                                                      | 4                                                                                         | 5             | 6           | 7           | 8           | 9                                                  |
| SK-17                              | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                                      | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel                                | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (002) dibagi total anggaran 002 dikali 100% | 85%           | 86%         | 87%         | 90%         | Kepala Bagian Umum                                 |
|                                    |                                                                                                                | Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal yang difasilitasi | Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal yang difasilitasi    | 12 bulan      | 12 bulan    | 12 bulan    | 12 bulan    |                                                    |
| SK-17                              | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                                      | Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal                   | Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal yang difasilitasi    | 12 bulan      | 12 bulan    | 12 bulan    | 12 bulan    | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Pengelolaan BMN |
|                                    |                                                                                                                | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel                                | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (002) dibagi total anggaran 002 dikali 100% | 85%           | 86%         | 87%         | 90%         |                                                    |
| SK-17                              | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                                                      | Persentase surat yang terfasilitasi tepat waktu                                        | Jumlah surat yang terfasilitasi tepat waktu dibagi total surat dikali 100%                | 85%           | 90%         | 92%         | 95%         | Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip             |
| SK - 14                            | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Persentase pengelolaan layanan pimpinan yang terfasilitasi                             | Persentase pengelolaan layanan pimpinan yang terfasilitasi                                | 100%          | 100%        | 100%        | 100%        | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                             | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                                           | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                | <b>Target</b> |               |               |               | <b>Penanggung Jawab</b>                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                             | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |                                                                    |
| 1                                   | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                           | 5             | 6             | 7             | 8             | 9                                                                  |
| SK-13                               | Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar          | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM, yang di susun              | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM, yang di susun                              | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan                          |
| SK-16                               | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif | Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal | Jumlah layanan teknologi informasi yang terfasilitasi dibagi dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi (kebutuhan pengguna/ user) | 82%           | 85%           | 87%           | 90%           |                                                                    |
| SK-16                               | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif | Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal | Jumlah layanan teknologi informasi yang terfasilitasi dibagi dengan perencanaan pengembangan teknologi informasi (kebutuhan pengguna/ user) | 82%           | 85%           | 87%           | 90%           | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Teknologi Informasi                  |
| SK-16                               | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif | Presentasi pengelolaan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan internal                                                   | Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang dibuat analisis per jenis temuan                                                                    | 82%           | 85%           | 87%           | 90%           | Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan I |

|       |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                  |               |               |               |               |                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| SK-16 | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif            | Presentasi pengelolaan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal                                   | Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dibuat analisis per jenis temuan                                    | 82%           | 85%           | 87%           | 90%           | Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan II |
| SK-13 | Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar                     | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM, yang disusun | Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM, yang disusun    | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi |                                                                     |
| SK-14 | Mengoptimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Presentase pengelolaan pengaduan yang difasilitasi                                                            | Presentase pengelolaan pengaduan yang difasilitasi tepat waktu dibagi dengan total layanan pengaduan dikali 100% | 90%           | 90%           | 90%           | 90%           | Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan                                 |

**CASECADING INDIKATOR KINERJA BAGIAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021-2024**

| <b>Casecading Sasaran Strategis</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                           | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                              | <b>Target</b> |             |             |             | <b>Penanggung Jawab</b>                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
|                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |                                        |
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                                | 4                                                                                         | 5             | 6           | 7           | 8           | 9                                      |
| SK - 17                             | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                         | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel          | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (001) dibagi total anggaran 001 dikali 100% | 85%           | 86%         | 87%         | 90%         | Kepala Bagian Keuangan                 |
| SK-18                               | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel                            | Hasil laporan keuangan KEMENKUMHAM                                                        | WTP           | WTP         | WTP         | WTP         |                                        |
|                                     |                                                                                   | Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal | Persentase realisasi keuangan ITJEN                                                       | 90%           | 92%         | 93%         | 95%         |                                        |
| SK - 17                             | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel                                         | Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel          | Jumlah realisasi anggaran layanan perkantoran (001) dibagi total anggaran 001 dikali 100% | 85%           | 86%         | 87%         | 90%         | Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran |
| SK-18                               | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal | Persentase realisasi keuangan ITJEN                                                       | 90%           | 92%         | 93%         | 95%         |                                        |

|       |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                          |      |      |      |      |                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Persentase pengajuan anggaran perjalanan dinas yang difasilitasi tepat waktu | Jumlah pengajuan anggaran perjalanan dinas yang difasilitasi tepat waktu dibagi dengan total usulan pengajuan perkalan dinas dikali 100% | 90%  | 92%  | 93%  | 95%  | Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas               |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel                                        | Persentase temuan laporan keuangan ITJEN yang ditindaklanjuti untuk mendukung WTP                                                        | 100% | 100% | 100% | 100% | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Persentase ketersediaan anggaran perbulan melalui UP, TUP, SPM, GUP          | Jumlah ketersediaan anggaran perbulan melalui UP, TUP, SPM, GUP dibagi anggaran yang diajukan ITWIL/Bagian dikali 100%                   | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan                 |



Inspektur Jenderal,

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.